

ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan pada anak dan juga praktik melanggar hak-hak yang dimiliki seorang anak. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil kebijakan sebagai langkah untuk menindaklanjuti pencegahan perkawinan anak melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, 1. Bagaimanakah implementasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan. Jenis penelitian skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) atau hukum empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Implementasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada nyatanya masih belum terlaksana secara efektif, dikarenakan secara umum memang masih banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan beberapa hal yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan yaitu: *Marriage by accident* (Hamil di luar nikah), faktor pendidikan dan faktor ekonomi. 2. Faktor penghambat pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan adanya Peraturan Gubernur tersebut. Dan juga kurangnya fasilitas yang dapat menunjang dan penindaklanjutan terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak ini. Peraturan Gubernur Nomor 35

Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini dalam pandangan Islam sudah memenuhi kemaslahatan sesuai dengan tujuan- tujuan dalam agama Islam. Sehingga dengan adanya kebijakan Peraturan Gubernur tersebut, maka harus dilaksanakan secara maksimal agar terwujudnya tujuan keluarga sesuai dengan syariat Islam yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kata Kunci: Implementasi, Pencegahan Perkawinan Anak, Peraturan Gubernur.

ABSTRACT

Child marriage is a form of violence against children and also practices violating the rights of a child. The Provincial Government of the Bangka Belitung Islands has taken a policy as a step to follow up on the prevention of child marriage through the Regulation of the Governor of the Bangka Belitung Islands Number 35 of 2019 concerning the Prevention of Child Marriage. The formulation of the problem from this research is, 1. How is the implementation of prevention of child marriage in South Bangka Regency based on the Regulation of the Governor of the Bangka Belitung Islands Number 35 of 2019 concerning Prevention of Child Marriage in the Bangka Belitung Islands Province 2. What are the inhibiting factors for the implementation of prevention of child marriage in Bangka Regency South. This type of thesis research includes field research or empirical law, namely studying legal provisions regarding the process of occurrence and the working process of law in society. This study uses interviews and documentation methods. The results of this study can be concluded that 1. Implementation of prevention of child marriage in South Bangka Regency based on the Regulation of the Governor of the Bangka Belitung Islands Number 35 of 2019 concerning Prevention of Child Marriage in the Bangka Belitung Islands Province in fact has not been implemented effectively, because in general there are still many carried out not in accordance with procedures set by the government and several things that encourage child marriage in South Bangka Regency, namely: Marriage by accident (pregnancy outside of marriage), educational factors and economic factors. 2. The inhibiting factor for the implementation of child marriage prevention in South Bangka Regency is the lack of socialization to the community because there are still many people who do not know about the Governor's Regulation. And also the lack of facilities that can support and follow up on the prevention of child marriage. Governor Regulation Number 35 of 2019 Concerning the Prevention of Child Marriage, in the view of Islam, has fulfilled the benefit in

accordance with the objectives of the Islamic religion. So that with the Governor's Regulation policy, it must be implemented optimally so that the goals of the family are realized in accordance with Islamic law, namely a sakinah, mawaddah and rahmah family.

Keywords: *Implementation, Prevention of Child Marriage, Governor's Regulation.*